

Jurnal Istiwa

ISSN : 0854 - 4239

MEDIA KREATIVITAS DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Volume 16 Nomor 2 – Maret 2010

**Nasionalisme dan Tantangannya di Indonesia
(Menyoal Nasionalisme di Indonesia)**

Oleh: Iriyanto Widisuseno

Penelitian bagi Peneliti Pemula

Oleh: H. Moch. Fatkhuronji

**Pengelolaan Kelas pada Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Oleh: Hj. Endang Listyani

**Pengaruh Penggunaan Media Gambar Animasi
terhadap Hasil Belajar IPS di MIN Grobogan**

Oleh: Zulaikhah

***Emotional Intelligence* dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Oleh: H. Muslim

Eksistensi Pesantren: Format Pendidikan Islam Ideal

Oleh: Dewi Evi Anita

**Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) dalam Meningkatkan Kualitas Perkawinan**

Oleh: Ali Imron Hs

**Kontribusi Hukum Islam tentang
Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**

Oleh: Muhyidin

**Menyongsong Epistemologi Baru Hukum Islam
Muhammad Abed al-Jabiri**

Oleh: Tali Tulab

**Pentingnya Telaah Ulang terhadap Mazhab Dakwah Islam
di Indonesia**

Oleh: Kholil Lur Rochman



SETIA WS

Jurnal Istiwa

Vol.
16

No.
2

Hal.
107-214

Semarang
Maret 2010

ISSN
0854 - 4239

Penanggung Jawab:

Drs. H. Mukhlisin Bisyrri, SE, M.Ag, MM
(Ketua SETIA Walisembilan Semarang)

Pemimpin Umum:

Drs. H. Muslim, M.Ag, M.Pd

Pemimpin Redaksi:

H. M. Fatkhuronji, S.Ag, M.Pd.I

Sekretaris Redaksi:

Mustafirin, S.Pd.I, M.Pd

Bendahara:

Kamalun Ni'ant, SE

Dewan Redaksi:

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, MA, Ph.D

Prof. Dr. H. Erfan Subahar, MA

Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA

H. Muqoffin Mukhtar Lc., M.Pd.I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

Drs. H. Murawar

Drs. H. Abdul Kholik, M.Pd

Drs. Mushonef Yahya, MSI

Drs. H. Ali Fauzin, MM, M.Par

Fadhil, M.Ag

Editor/Layout:

Iman Fadhilah, SHI, MSI

Tata Usaha:

Didik Priyono Hartono

Sirkulasi:

M. Arifin

H. Abd. Rozaq, S.Ag

H. Muhdlori, S.Ag

Coyo Hudi Susilo, S.Ag, M.MPd

Dodi Ashari

No. Rekening:

BNI No. Rek. 0115 767468 an. SETIA WS

Diterbitkan Oleh:

Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan (SETIA WS)
Semarang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha:

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 17 Telp. 024-8453693 Semarang 50136
e-mail: setia_walisembilan@yahoo.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Salam Redaksi	ii
Nasionalisme dan Tantangannya di Indonesia (Menyoal Nasionalisme di Indonesia) Oleh: Iriyanto Widisuseno	107
Penelitian bagi Peneliti Pemula Oleh: H. Moch. Fatkhuronji	115
Pengelolaan Kelas pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Oleh: Hj. Endang Listyani	125
Pengaruh Penggunaan Media Gambar Animasi terhadap Hasil Belajar IPS di MIN Grobogan Oleh: Zulaikhah	133
<i>Emotional Intelligence</i> dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: H. Muslim	143
Eksistensi Pesantren: Format Pendidikan Islam Ideal Oleh: Dewi Evi Anita	155
Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam Meningkatkan Kualitas Perkawinan Oleh: Ali Imron Hs	167
Kontribusi Hukum Islam tentang Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Oleh: Muhyidin	179
Menyongsong Epistemologi Baru Hukum Islam Muhammad Abed al-Jabiri Oleh: Tali Tulab	195
Pentingnya Telaah Ulang terhadap Mazhab Dakwah Islam di Indonesia Oleh: Kholil Lur Rochman	203

Jurnal ini diterbitkan untuk memacu pengembangan ilmu-ilmu Keislaman, Pendidikan Islam, Hukum Islam dan Komunikasi Islam menuju masyarakat yang damai, berbudaya, demokratis dan berkeadilan menuju masyarakat berkewarganegaraan (*civil society*). Redaksi menerima tulisan sekitar 10-15 halaman kuarto dengan spasi ganda dari kalangan manapun dan berhak mengedit naskah yang masuk tanpa merubah substansinya serta sudah dalam bentuk *soft file*.

NASIONALISME DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA (Menyoal Nasionalisme di Indonesia)

Oleh: Iriyanto Widisuseno*

Abstrak

8

Semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami kegoyahan, akibat dari multi krisis internal bangsa dan terpaan arus globalisasi. Keinginan untuk eksis dan hidup bersama yang tumbuh dari akar kepahlawanan, kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu kini semakin surut. Jiwa nasionalisme bangsa harus ditumbuhkembangkan kembali dengan memanfaatkan sisi peluang dalam tantangan globalisasi. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa menempati posisi strategis dalam kerangka membangun nasionalisme Indonesia. Peran pemerintah melalui lembaga pendidikan formal sebagai motivator dan fasilitator menjadi sangat penting dan urgen. Perlu langkah antisipatif dan nyata untuk merumuskan metodologi pembelajaran yang memungkinkan proses pembelajaran nasionalisme Indonesia bagi anak-anak usia sekolah dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: nasionalisme, globalisasi, generasi muda, metodologi pembelajaran.

A. Pendahuluan

Ilstilah nasionalisme atau peri kebangsaan digunakan oleh Soekarno sebagai asas kebangsaan Indonesia (asas pertama dalam Pancasila) dimaksudkan semua golongan yang berselisih akan dipersatukan dalam perjuangan mewujudkan suatu negara kebangsaan (*nation state*) Indonesia yang merdeka. Semua kelompok, golongan atau wilayah di nusantara adalah bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan besar bernama Indonesia. Ernest Renan dalam bukunya *Qu'est ce Qu'une Nation*

menyatakan bahwa hakikat nasionalisme adalah *le desire vivre ensemble* (keinginan untuk hidup bersama), dan *le desire d'être ensemble* (keinginan untuk eksis bersama), bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual '*une ame, un principe spirituel*' yang berakar pada kepahlawanan masa lalu yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu.

Globalisasi sering ditempatkan sebagai tantangan bagi negara kebangsaan. Tantangan bisa berbuah positif, bisa juga negatif. Masalahnya proses globalisasi didorong oleh spirit liberalisme yang mengulirkan sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal. Isu-isu yang dikembangkan masalah *open market, free trade*, yang mengarah persaingan terbuka. Ke-

* Penulis adalah dosen FIB Undip Semarang dan Tim Pokja Dirjen Dikti Pengkajian dan Penerapan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

mudian masalah unipolarisasi ideologi, tatanan dunia, sistem politik global mengarah pada tata kehidupan mondial. Untuk memasuki arus globalisasi perlu kesiapan mental masyarakat menghadapi perubahan. Nilai-nilai jati diri bangsa sebagai inti kekuatan negara kebangsaan menjadi sasaran arus nilai-nilai global. Eksistensi negara kebangsaan tergantung dari kemampuan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) untuk menghadapi arus perubahan.

Namun fakta yang menunjukkan, hingga kini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan kebangsaan yang serius. Berawal dari krisis ekonomi berkembang ke arah krisis politik, dan akar-akar masalahnya menjalar sampai krisis moral. Berbagai gejolak sosial politik terus menerus timbul, dalam kumulasinya yang kini kita rasakan menampakkan sebagai persoalan kebangsaan. Di tingkat internasional, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling korup di dunia, tidak efisiennya pengelolaan negara akibat ekonomi biaya tinggi dan kelemahan sistem birokrasi mempengaruhi minat para investor asing. Di dalam negeri, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelangngan persatuan bangsa Indonesia.

Mencermati situasi kebangsaan yang demikian dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya pro-aktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui jalur pendidikan diharapkan peserta didik

memperoleh wawasan kebangsaan yang luas sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang, serta mengapresiasi nilai-nilai kecintaan pada tanah air.

B. Persoalan Kebangsaan sebagai Sebuah Tantangan Nasionalisme

1. Masa Transformasi dan Transisi

Saat ini ada nilai-nilai yang secara sistematis sedang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di dunia, yaitu liberalisme yang mempraktekkan kapitalisme dalam bidang ekonomi dan praktek demokrasi dalam kehidupan politik. Ke depan kita semakin dituntut menjamin terlaksananya HAM, penegakan hukum, dan *concern* lingkungan hidup.

Di sisi lain masyarakat Indonesia sedang mengalami pancaroba, banyak terjadi transformasi, misalnya: transformasi dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk ekonomi. Keseluruhan proses tersebut, menyebabkan sebagian masyarakat mengalami *disorientasi* nilai.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tradisional, dapat mengadaptasi berbagai perubahan, agar dapat hidup dengan bahagia dalam lingkungan baru diperlukan kehadiran *Neo Traditional Norm*, yaitu nilai-nilai baru yang berakar pada nilai-nilai tradisional (*core values*) yang sesuai dengan tuntutan zaman baru. Seperti Jepang yang sangat menghargai nilai-nilai tradisionalnya, berhasil membentuk "*The New Traditional Norm*" nya.

Negara kita juga sedang mengalami transisi dalam sistem politik, ekonomi dan manajemen Negara. Dalam sistem politik terjadi transisi dari otokratik ke demokratis, dari sistem ekonomi *perkoncom* dan serba pengaturan (*over regulated*) ke sistem ekonomi pasar. Kemudian dari sistem manajemen negara sentralistik ke desentralistik, dengan otonomi daerah yang meningkat. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa dalam berbagai hal, antara lain loncatan demokratisasi, transparansi. Liberalisasi yang bersamaan demokratisasi dalam waktu lima tahun terakhir telah melahirkan lebih dari 200 partai, menjadikan kehidupan politik tidak efisien serta diberlakukannya ekonomi pasar dengan segala dampak positif dan negatifnya, penerapan sistem bikameral, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, DPR/DPRD yang sangat berkuasa dan Bank Indonesia yang *independent*, otonomi daerah dan desentralisasi, sampai terjadi daerah dengan sistem yang berbeda dengan sistem nasional.

Beberapa negara yang telah melaksanakan banyak perubahan dalam waktu singkat, telah mengalami kegagalan, seperti negara Uni Soviet Sosialis Rusia, yang berkehendak menerapkan demokratisasi *glasnost* dan *perestroika*, telah tercerai berai menjadi banyak negara. Yugoslavia, negara federal yang sentralistik ketika berkehendak memberikan otonomi yang lebih luas pada negara-negara bagiannya, telah tercerai berai menjadi negara-negara berdasarkan etnik. Serbia-Montenegro, Bosnia, Croatia, Slovenia dan Macedonia.

Namun banyak juga negara-negara yang sukses dalam proses perubahan itu. Korea Selatan yang awalnya negara feodal (tahun 1950-1953), korup, dan bukan bangsa pekerja, sekarang telah mampu merubah dirinya menjadi masyarakat yang

egaliter, pekerja keras berdisiplin tinggi, produktif efisien, terutama sejak kepemimpinan Park Chung Hee, sekarang menjadi negara sejahtera. Singapore ketika masih menjadi Negara jajahan Inggris dikenal sebagai "*An Old Traditional China Town*", setelah merdeka dalam waktu singkat mampu berkembang menjadi negara yang sejahtera, efisien, bersih, tertib dan modern, sejak kepemimpinan PM. Lee Kwan Yew.

Lee Kwan Yew telah memberi keteladanan sebagai pemimpin yang sederhana, pekerja keras. Nampak di sini bahwa setiap perubahan dapat menghasilkan kemajuan atau kemunduran, sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan masyarakatnya dalam menerima dan melakukan perubahan itu serta kemampuan para pemimpinnya dalam mengelola perubahan itu dan memberi keteladanan.

Bukti-bukti empirik bahwa masyarakat terlebih yang paternalistik, akan dengan cepat melakukan dan mengikuti perubahan serta kemajuan bila ada keteladanan dari para pemimpinnya (Siswono Yudo Husodo, 2005)

Kemudian dengan berakhirnya perang dingin yang sarat diwarnai persaingan ideologis antara blok Barat yang mempromosikan liberalisme-kapitalisme, desentralisasi/federalisme, dan blok Timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, sentralisme, tata pergaulan dunia mengalami perubahan-perubahan mendasar. Di masa lalu rivalitas politik-ideologis di tingkat global telah memberikan pengaruh pada konflik-konflik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dapat disimpulkan, era persaingan ideologis dalam dimensi global telah mengalami perubahan bentuk berkali-kali. Di zaman penemuan benua baru, kolonialis/imperialis bertempur de-

ngan calon jajahan, perbenturan nasionalisme dengan kolonialisme/imperialisme. Lalu komunisme dengan liberalisme/kapitalisme. Saat ini kita belum membayangkan bahwa dalam waktu dekat akan muncul kembali persaingan ideologis yang keras yang meliputi seluruh wilayah dunia. Kekhawatiran dari banyak negara sekarang adalah pada upaya Amerika Serikat mempromosikan doktrin *unilateralisme* dalam menangani masalah internasional sebagai wujud dari konsepsi dunia *unipolar* yang ada di bawah pengaruhnya. Lembaga dunia yang paling berpengaruh yaitu PBB pun cenderung terdikte oleh politik Amerika Serikat.

Persaingan dunia sekarang ini cenderung masuk kembali, dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi, budaya dan peradaban. Setiap negara kini sedang berjuang keras meningkatkan kesejahteraan ekonomi, budaya dan peradabannya. Melalui kejuaraan olah raga, olimpiade fisika, Nobel, menjadi sesuatu yang dikejar. Nampaknya, tinggi rendahnya harkat, derajat dan martabat suatu bangsa semakin diukur dari tingkat kesejahteraan, budaya dan peradabannya (Siswono Yudo Husodo, 2005).

Sementara di Indonesia masih terjadi maraknya tawuran, perusakan sarana ibadah agama lain, perkelahian antar mahasiswa, serta gerakan-gerakan *anarkhis* lainnya yang mengarah kepada *sparatisme*. Keseluruhan kejadian itu merupakan hal-hal yang merendahkan peradaban dan eksistensi bangsa. Pada masa-masa seperti ini, pemerintah, negara, masyarakat harus cerdas, matang dalam menyikapi berbagai hal. Mulai dari sistem manajemen pemerintahan negara hingga perilaku masyarakat setidaknya berbasis wawasan kebangsaan yang kuat.

2. Distorsi Nasionalisme (Penyimpangan – pemutarbalikan Nilai-nilai Kehidupan Kebangsaan)

Hingga kini bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan kebangsaan yang rumit dan kompleks, yaitu krisis multi-dimensional. Bermula dari krisis moneter, berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik, kemudian mengembangkan akar-akarnya tertanam dalam krisis moral dan menjalar ke dalam krisis budaya, menjadikan masyarakat telah kehilangan orientasi nilai. Perikehidupan menjadi hambar, kejam dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan spiritual.

Sementara reformasi yang digulirkan dalam perjalanannya timbul polarisasi dan kontradiksi dalam visi dan misi dikalangan para pendukung reformasi. Gejala *societal terrorism* muncul dimana-mana, berupa pergolakan fisik, pembunuhan, pemboman, pembakaran, penjarahan, perampokan, dan tindakan sejenis *anarkhisme* lainnya, kini masih menjadi pemandangan umum.

Kini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cenderung mengantarkan ke arah situasi kehidupan kebangsaan yang bersifat disintegratif mengancam eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan RI. Bila kita cermati, tantangan-tantangan yang bersifat sentrifugal ini bersumber pada dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sebagai konsekuensi logis dari runtuhnya kekuasaan Orde Baru, telah mendorong perubahan iklim dari "keterpasungan demokrasi" menuju "kebebasan demokrasi", tetapi sayangnya tidak didukung oleh infrastruktur mental yang kondusif menjadikan demokrasi mengarah ke anarkhi. Faktor eksternal

bersumber pada berkembangnya era globalisasi yang menggulirkan semangat neoliberalisme kapitalistik dan demokrasi, membawa konsekuensi terutama dampak negatifnya bagi kehidupan manusia di berbagai bidang.

Apabila prinsip dan semangat nasionalisme sebagaimana dikemukakan Ernest Renan kini telah pudar dan menguap, maka itulah tanda-tanda yang kini muncul dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apa yang kita saksikan sekarang adalah hilangnya rasa saling percaya (*trust*) antar sesama, baik horisontal maupun vertikal. Gejala yang berkembang adalah perasaan saling curiga dan menjatuhkan sesama.

Menghadapi kenyataan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang sedang menghadapi distorsi nasionalisme tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali langkah proaktif yang harus dilakukan untuk menggugah spirit kebangsaan di kalangan para kepala desa/kelurahan, mengingat bahwa mereka adalah pemimpin terdepan di masyarakat yang hidup bersama di lingkungannya. Sikap, perilaku dan cara berpikir para kepala kelurahan/desa menjadi panutan masyarakat, pada gilirannya akan menjadi dasar dan arah pengembangannya.

3. Komitmen Masyarakat terhadap Nilai-nilai Dasar yang Telah Lama Menjadi Pandangan dan Pedoman Hidup Semakin Melemah

Bangsa Indonesia kini sedang mengalami kerapuhan sistem filsafat yang menjadi dasar dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut yaitu disebabkan adanya kekacauan dalam memahami Pancasila (kekacauan epistemologis).

Dalam era reformasi dewasa ini di kalangan masyarakat telah muncul berbagai argumen dan sikap berpikir yang mengindikasikan adanya kekacauan pemahaman atau pengetahuan mengenai Pancasila.

Kekacauan cara pemahaman yang pertama, menyamakan antara nilai, norma dan fakta (praksis) dalam memahami Pancasila. Bahwasannya, banyak kalangan masyarakat memandang secara rancu seakan-akan Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat. Implikasinya, di kalangan masyarakat muncul pandangan yang menyalahkan Pancasila, bahwa Pancasila tidak dapat mengatasi masalah, tidak mampu menjawab persoalan krisis, dsb. Iklim yang berkembang sekarang, semakin bermunculan permasalahan dalam masyarakat, memperkuat sikap antipati pada Pancasila.

Pancasila adalah suatu *sistem nilai* yang merupakan kesatuan utuh (Notonagoro, 1975). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan sistem filsafat, dan keberadaannya terdapat dalam realitas objektif bangsa Indonesia. Kenyataan ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai *causa materialis* Pancasila. Kemudian, The Founding Fathers kita pada tanggal 18 Agustus menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Notonagoro, dalam pengertian inilah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila itu sebagai *staats fundamentele norm*. Konsekuensinya nilai-nilai Pancasila secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD negara Indonesia, dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Pengertian semacam ini Panca-

sila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu implementasi tidak mungkin dilakukan secara langsung dari Pancasila (nilai) kemudian direalisasikan dalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas (Kaelan, 2006: 4).

Kekacauan cara pemahaman kedua adalah pada konteks politik, yang menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan suatu kekuasaan, rezim atau orde. Kenyataan ini dapat ditangkap dalam konteks politik bahwa berbicara Pancasila seakan-akan sebagai label Orde Baru. Kecenderungan ini dapat dipahami meskipun salah, saat Orde Baru berkuasa Pancasila diturunkan derajatnya sebagai suatu legitimasi politis. Semua kebijakan pemerintah mengatasnamakan Pancasila, bahkan diistilahkan sebagai "pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen". Kejadian lain sebagai bentuk penyimpangan yang sama terjadi pula pada zaman Orde Lama, dengan mengembangkan Nasakom, Manipol Usdek, Tri Sila dan Eka Sila. Setelah timbul gerakan reformasi 1998 semua kesalahan ditimpakan kepada penguasa Orde Baru. Dengan serta merta dalam dunia politik, berbicara Pancasila dipandang identik dengan keinginan mengembalikan kewibawaan Orde Baru.

Kekacauan cara pemahaman semacam ini perlu segera diluruskan, dengan mengembangkan pandangan kritis dan objektif mengenai Pancasila yang mengarah pada upaya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Strategi utama untuk revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan melalui revitalisasi epistemologis, yaitu Pancasila harus dikembangkan dengan melalui suatu kajian

ilmiah di dunia pendidikan di Indonesia (Kaelan, 2006). Revitalisasi Pancasila dilakukan dengan mengembangkan *Core Philosophy* Pancasila sebagai suatu filsafat Bangsa Indonesia. Hal ini senada dengan kurikulum di Amerika yang mengembangkan mata kuliah umum yang meliputi *General Education/Humanities* yang terdiri atas *History, Humanity and American Philosophy*. Dalam buku *Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)* dicantumkan "*Studies in the humanities and social sciences serve not only to meet the objectives of engineering profession*". Di Jepang *General Education/Humanities* terdiri atas *Japanese History, Ethics and Japanese Philosophy, Science and Religion*.

Menurut hemat kami, upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses epistemologis tersebut sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa sebagai suatu identitas bangsa dan negara Indonesia. Suatu hal yang sangat mengherankan jika saat ini kita melakukan reformasi, kajian tentang filosofi bangsa semakin melemah, sampai kurikulum sekolah tidak lagi memberikan kuliah Pendidikan Pancasila.

Fakta di masyarakat menunjukkan di hadapan kita sehari-hari, bahwa secara objektif rakyat menginginkan realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

C. Menumbuhkan Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Pembinaan Nasionalisme Indonesia

1. Memupuk Kesadaran adanya Kesamaan Sejarah Masa Lalu

Negara kebangsaan Indonesia terbentuk dengan ciri yang sangat unik dan spesifik. Berbeda dengan Jerman, Inggris,

Prancis, Italia, Yunani, Spanyol, Belanda, dan banyak negara lain yang menjadi suatu negara bangsa karena kesamaan bahasa. Berbeda pula dengan Australia, India, Srilangka, Singapura, yang menjadi suatu negara bangsa karena kesamaan daratan. Lain halnya Jepang, Korea Utara/Selatan, RRC dan negara-negara di Timur Tengah, menjadi suatu negara bangsa karena kesamaan ras. Israel, Pakistan, menjadi negara bangsa karena alasan agama.

Indonesia menjadi suatu negara kebangsaan disamping atas upaya besar para pendiri negara (*founding fathers*), juga karena kesamaan sejarah masa lalu, nyaris kesamaan wilayah selama 500 tahun. Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 sampai ke-12, serta 300 tahun Kerajaan Majapahit dari abad ke-12 sampai abad ke-15 dan sama-sama 350 tahun (akhir abad ke-18 sampai 1942) dijajah Belanda serta 3,5 tahun (1942 – 1945) oleh Jepang.

Semangat kebangsaan yang menyatukan kita yang beragam ini lahir dari tekad unsur-unsur yang membentuk bangsa ini. Berbeda dengan Sumpah Palapa-nya Mahapatih Gajah Mada pada sekitar tahun 1330 yang lebih merupakan tekad kerajaan Majapahit untuk menyatukan seluruh nusantara di dalam kekuasaannya. Negara kebangsaan Indonesia lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945, pada bagian pembukaannya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat kita yang beraneka ragam suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu Indonesia (Siswono Yudohusodo, 2005).

2. Memperkuat Paradigma Fungsi bagi Eksistensi suatu Masyarakat atau Bangsa

Menurut sosiolog Talcott Parsons dalam bukunya *Social System*, bila suatu masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, ada empat paradigma fungsi (*function paradigm*) yang harus terus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pertama, pattern maintenance: yaitu kemampuan menjaga jati dirinya, memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Budaya masyarakat itu sendiri akan berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat kemudian, tetapi perlu tetap memelihara nilai-nilai yang dianggapnya luhur, karena tanpa hal itu akan terbentuk masyarakat baru yang lain, bukan kelanjutan dari masyarakat sebelumnya.

Kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Sejarah membuktikan banyak peradaban masyarakat yang telah hilang, karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia.

Ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus menerus, sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang semakin menyatukan masyarakat tersebut.

Keempat, masyarakat perlu memiliki *goal attainment* atau tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Kalau negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalunya, maka ke depan perlu dimantapkan oleh kesamaan cita-cita, pandangan, harapan dan tujuan tentang masa depannya.

Dalam perspektif negara kebangsaan, empat paradigma fungsi (*function paradigm*) Parson, kerangka sistemiknya termanifestasikan dalam Pancasila yang merupakan *Weltanschauung* bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting bagi bangsa Indonesia untuk terus menerus merevitalisasi ideologi negara kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila.

D. Langkah Pembinaan Nasionalisme Indonesia melalui Jalur Pendidikan

Langkah pembinaan nasionalisme Indonesia melalui jalur pendidikan hendaknya mampu mengembangkan substansi kajian pembelajaran yang mengacu pada pilar-pilar penyangga bagi tegaknya eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, berdaulat, adil berkemakmuran, dan berjiwa diri. Perlu pengembangan metode pembelajaran yang memungkinkan proses pembelajaran nasionalisme bagi peserta didik dapat berjalan efektif. Langkah yang dapat ditempuh mengubah paradigma pembelajaran: dari *teacher centered* menjadi *student centered* dari *teaching* menjadi

learning, dari *teacher active learning* menjadi *student active learning*, dari *transfer of knowledge* menjadi *transfer of values*. Dari *expose verbal* menjadi *problem solving*, *inquiry* dan *participatory*. Pembinaan nasionalisme Indonesia hendaknya dilakukan menurut jenjang pendidikan yang ada, sehingga substansi kajian sesuai kompetensi dasar masing-masing (Iriyanto, 2006).

E. Kesimpulan

1. Mencermati perkembangan permasalahan kebangsaan dan kemasyarakatan yang menggulir saat ini, masalah pembinaan nasionalisme Indonesia nampak semakin urgen untuk ditindaklanjuti. Dunia pendidikan di sini menduduki posisi sentral dan strategis.
2. Urgensi pembinaan nasionalisme ini nampak urgen tatkala persoalan nasionalisme menempatkan peserta didik pada posisi sebagai generasi muda penerus bangsa.
3. Pengembangan metode pembelajaran perlu diikuti teknologi pembelajaran yang memadai dan SDM yang berkompeten.[]

Daftar Pustaka

- Iriyanto Widisuseno, 2006, "Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis", Makalah Simnas IV. MPK, UNS Surakarta.
- Koento Wibisono, 2006, "Revitalisasi dan Reorientasi MPK", Makalah Simnas III MPK, UNDIP.
- Kaelan, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Fak Filsafat UGM.
- Siswono Yudohusodo, 2005, "Pancasila, Globalisasi dan Nasionalisme Indonesia", Makalah Seminar Nasional Jati Diri Bangsa, Jakarta.